

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia pada saat sekarang ini sedang dihadapkan pada permasalahan perekonomian, sosial politik dan juga hankammas. Pembangunan yang dilaksanakan harus benar-benar mewujudkan suatu efektivitas pada peningkatan kehidupan rakyat banyak bukan hanya untuk sekelompok masyarakat saja.

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan-perbaikan menuju arah tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu tidak akan tercapai dengan baik apabila segala upaya pembangunan tidak diarahkan sedemikian rupa dengan rencana yang ditetapkan. Salah satu upaya yang penting dalam hal ini adalah peranan pengawasan guna mengendalikan seluruh fasilitas dan peralatan yang dipergunakan di dalam proses pelaksanaannya, sehingga dalam pencapaian tujuan digariskan akan tercapai.¹

Kemudian di dalam proses pengawasan itu sendiri harus diusahakan berjalan dengan efisien dan efektif. Untuk itu pengawasan yang baik haruslah didasari dengan sistem yang baik pula. Hal tersebut sangat penting sebab pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan organisasi, melainkan adalah suatu alat yang akan memperlancar pencapaian tujuan yang baik di dalam suatu organisasi. Dengan kata

¹Sudaryanto, *Administrasi Keuangan Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 4.

lain janganlah pengawasan malah akan menghambat usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Jelaslah bahwa pengawasan sangat menentukan perannya di dalam proses pencapaian tujuan. Bahkan secara filosofis dapat diterima bahwa pengawasan itu mutlak perlu karena manusia banyak memiliki segi-segi kelemahan yang dapat menyebabkan kesalahan atau kesitapan. Sesuai dengan uraian di atas, manusia perlu diamati bukan berarti mencari-cari kesalahannya dan kemudian menghukumnya. Akan tetapi melalui pengawasan yang baik, di samping mampu memberi kendali sekaligus juga bersifat mendidik dan membimbing.

Pengawasan sebagai salah satu tugas Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan di Medan dalam hal pelaksanaan pertanggung jawaban administrasi keuangan di lingkungan instansi pemerintahan baik itu BUMN, Pemerintah Provinsi maupun Daerah, sehingga dengan adanya Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan di Medan ini maka akan didapatkan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara terutama dalam pelaksanaan pekerjaannya atas pertanggung jawaban administrasi keuangan terutama dalam hal pelaksanaan pengawasan pengelolaan administrasi keuangan.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat sentral sekali dalam keberadaannya di sebuah karya ilmiah, dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik khusus serta gambaran dari isi.